

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Penelitian	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Promotor Dan Co-Promotor.....	iii
Motto dan Persembahan Promovendus.....	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Disertasi.....	v
<i>Abstract</i> / Abstrak dan Kata Kunci Disertasi	vi
<i>Summary</i> / Ringkasan Disertasi	viii
Kata Pengantar Disertasi.....	xv
Daftar Isi.....	xix
Daftar Tabel dan Daftar Ragaan	xxii
Glossary.....	xxiv
Daftar Singkatan dan Akronim	xxviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Permasalahan	1
B.Perumusan Masalah.....	21
C.Tujuan Penelitian.....	22
D.Manfaat Penelitian.....	23
E.Orisinalitas Penelitian.....	24
F.Kerangka Pemikiran.....	35
G.Kerangka Konseptual	39
I.Metode Penelitian	82
J.Sistematika Penelitian.....	96
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	97
A. Tinjauan Umum dan Ruang Lingkup PMA di Indonesia.....	97
1.Definisi dan Konsep Teoritis PMA Menurut Hukum Investasi Trans-nasional	97

2.Kronologi Infiltrasi PMA dan Terbitnya Peraturan Perundang-undangan Investasi ke Dalam Wilayah Nusantara dan NKRI	111
3.Perangkat Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi Asing di Indonesia	114
4.Asas,Tujuan dan Prinsip PMA di Indonesia	135
5.Mekanisme Pendirian Perusahaan PMA di Indonesia	144
6.Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Investasi PMA.....	152
7.Fasilitas Pemberian Insentif di Bidang PMA.....	157
8.Otoritas/Kewenangan Pemegang Peran Kebijakan dalam Aktifitas PMA	162
9.Peranan dan Ekspektasi Aktifitas PMA dalam Pembangunan Perekonomian Nasional	172
B.Pandangan Hukum Islam Terhadap Aktifitas PMA di Indonesia	180
1.Akad Syirkah (<i>Joint Enterprise Agreement</i>) Menurut Ajaran Islam	180
2.Konsep Mudharabah (<i>Joint Enterprise</i>) dan Prinsip Bagi Hasil.....	183
3.Sistem Bagi Hasil dalam Praktik PMA Sebagai Alternatif Pengganti Riba.....	187
4.Pemberdayaan Sistem PMA Syariah Sebagai Pengganti Sistem PMA Kapitalis.....	194
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN PMA BELUM BERKEADILAN.....	202
A.Kedaulatan Ekonomi Nasional Bidang Perinvestasian Masih Tertekan oleh Konvensi Internasional.....	202
B.Kinerja Aparatur RI Lebih Dominan Pada Fungsi Promosi Investasi Dibanding Fungsi Kontrol Pengawasan-Penindakan.....	223
C.Pemberian Hak Transfer dan Repatriasi Keuntungan Usaha PMA Mengurangi Kesempatan Perolehan Modal UMKM dan Koperasi	243
D.Infiltrasi PMA Menyebabkan Sektor Agraris dan Maritim Sebagai Corak Khas Mata Pencaharian WNI Menjadi Terbengkalai.....	263

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN KEBIJAKAN PMA PADA MASA KINI.....	283
A.Kedudukan Investor Lokal Pada Pola <i>Joint Enterprise</i> Masih di Tingkat Pesero Komplekmenter-Minoritas.....	283
B.Kebijakan Pemberian Jangka Waktu Izin Usaha PMA Terlalu Panjang Sehingga Menyulitkan Pemerintah RI dalam Mereformasi Kebijakan PMA.....	303
C.Kemerosotan Ketahanan Lingkungan Hidup Karena <i>Green Investment Policy</i> Terhadap PMA Kurang Tegas	323
D.Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase ICSID Menghambat Kebijakan Nasionalisasi / Akuisisi Perusahaan Modal Asing	343
BAB V REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PMA BERBASIS NILAI KEADILAN	363
A.Kebijakan PMA di Indonesia Belum Ideal	363
1.Tekanan Konvensi Internasional Terhadap Sistem Penanaman Modal Nasional Harus Disiasati Secara Bijaksana	365
2.Urgensi dan Perlunya Asas Keadilan dalam Perumusan Kebijakan PMA.....	369
3.Perbandingan Kebijakan PMA pada Negara Lain yang Lebih Tinggi Kualitas/Kuantitasnya Dibanding Indonesia	371
a. Kebijakan Investasi Asing di Negara R.R.China	371
b. Kebijakan Investasi Asing di Negara India	382
B.Rekonstruksi Kebijakan PMA Berbasis Nilai Keadilan.....	405
1.Relevansi Perlindungan Hukum dan Legislasi Peraturan PMA Dalam Mencapai Keadilan Distributif-Substantif.....	405
2.Rekonstruksi Dasar Hukum PMA yang Belum Berkeadilan	416
BAB VI PENUTUP	427
A. Simpulan.....	427
B. Implikasi Studi.....	431
C. Saran-Saran.....	432
Daftar Pustaka	xxxi